

## DAFTAR PUSTAKA

Aeni, S. N. (2020). *Analisis Rasio Untuk Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Pada*

*Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD). Studi Kasus Pada Kabupaten*

*Tegal Tahun 2015 – 2019.*

Anastasia, A. M. (2012). *Evaluasi Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Bulukumba.*

Universitas Hasanuddin Makassar, Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Makassar.

Dwiyanto, A. (2005). *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik.* Pustaka

Pelajar. Yogyakarta

Halim, A. (2007). *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah.* Yogyakarta: UPP

STIM YKPN

Halim, A. (2008). *Akuntansi Keuangan Daerah.* Edisi Ketiga. Jakarta : Salemba Empat.

Halim, A. (2012). *Teori, Konsep, dan Aplikasi Akuntansi Sektor Publik.* Salemba Empat.

Halim, A. (2013). *Teori, Konsep, dan Aplikasi Sektor Publik.* Jakarta: Salemba Empat.

Halim, A. (2014). *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah Edisi ketiga.* Jakarta:

Salemba Empat

Halim, A. (2016). *Analisis Laporan Keuangan Edisi ke5.* Yogyakarta: UPP STIM YKPN.

Mahmudi. (2010). *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Edisi Dua.* Yogyakarta:

UPP STIM YKPN.

Mahmudi. (2016). *Akuntansi Sektor Publik – Edisi Revisi.* Yogyakarta: UII Press.

Munawir, S. (2012). “Analisa Informasi Keuangan”. Yogyakarta : Liberty.

Novia, A. (2019). *Analisis Kinerja Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pada*

*Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan. Studi kasus Pada Kabupaten Tegal.*

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 690.900-327 Tahun 1996 tentang Kriteria Penilaian dan

Kinerja Keuangan. Jakarta.

Peraturan Pemerintah. (2010). *Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar*

*Akuntansi Pemerintah.*

Republik Indonesia. (2004). *Undang – Undang RI No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah*

*Daerah.*

Republik Indonesia. (2004). *Undang – Undang RI No. 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan*

*Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah.*

Republik Indonesia. (2008). *Undang – Undang RI No. 13 Tahun 2008 Tentang Pemerintah*

*Daerah.*

Republik Indonesia. (2014). *Undang – Undang RI No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah*

*Daerah.*

Republik Indonesia. (2022). *Undang – Undang RI No. 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan*

*Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.*

Sari, I. P. (2016). *Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah, PAD, Leverage, Dana Perimbangan*

*dan Ukuran Legislatif terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi pada*

*Kab/Kota Pulau Sumatra.*

Siregar, H. A. (2016). *Analisis Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi*

*Provinsi Riau Dengan Belanja Modal Sebagai Variabel Pemoderasi. Jurnal Akuntansi,*

*Kewirausahaan dan Bisnis.* Vol. 1 No. 1, Juni 2016. STIE Pelita Indonesia.

Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Administrasi dilengkapi R&D.* Cetakan Kedua puluh,

Alfabeta. Bandung

Sulisworo, D. (2009). *Pengukuran Kinerja, Buku Ajar.* Yogyakarta: Universitas Ahmad Dahlan.

Suliyanto. (2005). *Metode Riset Bisnis.* Penerbit Andi. Yogyakarta.

